

**ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN
NIKAH BEDA AGAMA
DI TINJAU DARI PENDAPAT *FUQAHA* KLASIK
DAN KONTEMPORER**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**ALI SAHBAN NASUTION
NPM. 1621010118**

Program Studi : Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020**

**ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN
NIKAH BEDA AGAMA
DI TINJAU DARI PENDAPAT *FUQAH*A KLASIK
DAN KONTEMPORER**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**ALI SAHBAN NASUTION
NPM.1621010118**

Program Studi : Hukum Keluarga

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Pembimbing II : Dr. H. Khoiruddin Tahmid M. H.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama. Dalam skripsi ini adalah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt tentang pengabulan nikah beda agama, seolah olah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan surah al Baqarah ayat 221. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada masalah ini. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung sehingga mengabulkan permohonan nikah beda agama tersebut? 2. Bagaimana pandangan *fuqaha* klasik dan kontemporer terhadap perkawinan beda agama tersebut?. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian *Kualitatif* yaitu penelitian yang menggunakan studi *kepuustakaan* dengan mengkaji permasalahan perkara kemudian di korelasikan dengan *literature* dan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa bahwa: 1. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan nikah beda agama tersebut berdasarkan kepada UUD tahun 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan dan selama Undang Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 belum mengatur dengan tegas tentang perkawinan beda agama. 2. Pandangan *fuqaha* klasik terhadap perkawinan beda agama tersebut bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan namun perkawinan dengan wanita *ahl kitab* menurut ulama empat mazhab dan pendapat Qatadah masih diperbolehkan berlandaskan kepada surat al-Maidah ayat 5, kemudian *fuqaha* kontemporer sepakat mengharamkan perkawinan beda agama, yaitu pendapat Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul ulama, dan Muhammadiyah mengartikan wanita *ahl kitab* pada dewasa kini tidak termasuk dalam kategori *ahl kitab* dizaman rasul, walaupun Quraish shihab membolehkan menikahi wanita *ahl kitab* dengan kategori masih *muhshanat*, melihat kondisi dizaman sekarang wanita *muhshanat* dalam pemahamannya tidak masuk dalam kategori *muhshanat* dalam surah al-Maidah ayat 5, serta Ash shabuni juga membolehkan perkawinan beda agama antara laki laki muslim dengan wanita *ahl kitab* dengan catatan ia tidak khawatir (keimanan anaknya) dari ketauhidan dan aqidahnya kepada Allah. Menurut analisis penulis tidak sepakat terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt tersebut karena perkawinan menodai kemurnian tauhid dan aqidah yang diajarkan dalam agama Islam serta yurisprudensi itu tersebut berlaku fatal karena bisa dijadikan dasar hukum dalam hirarki Undang Undang di Indonesia sehingga akan banyak kasus pengabulan nikah beda agama kedepannya, dan semoga Allah merahmati ulama klasik dan kontemporer karena ketakutan mereka terhadap perkawinan serta berusaha menggali hukum dan berijtihad kepada orang Islam agar tidak ternoda kesyirikan mengenai perkawinan beda agama.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Sahban Nasution
NPM : 1621010118
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN NIKAH BEDA AGAMA DI TINJAU DARI PENDAPAT *FUQAHA* KLASIK DAN KONTEMPORER”** adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 februari 2020
Penulis,


Ali Sahban Nasution
NPM. 1621010118



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama I, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung
No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan
Permohonan Nikah Beda Agama Ditinjau Dari Pendapat
Fuqaha Klasik Dan Kontemporer

Nama : Ali Sahban Nasution

Npm : 1621010118

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Fakultas Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002

Dr. H. Khoiruddin, M. H.
NIP. 196210221993031002

Ketua Prodi Studi
Ahwal Syakhshiyah

H. Rohmat, S. Ag., M. H.I.
NIP. 1974092020033121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN
NIKAH BEDA AGAMA DI TINJAU DARI PENDAPAT FUQAH KLASIK
DAN KONTEMPORER"** disusun oleh **Ali Sahban Nasution, NPM**

1621010118, Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Kamis/13 Februari 2020.**

Tim Penguji

Ketua : **Dr. H. M. Zaki, M. Ag.**

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, M.H.**

Penguji I : **Dra. Firdaweri, M.H.I**

Penguji II : **Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**

Penguji III : **Dr. Khairuddin Tahmid, M.H.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

(Q. S. al-Baqarah: 221)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di jalan Nya, tidak lain hanya karena Nyalah penulis dapat menuntut ilmu karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang Muslim. Semoga atas keberhasilan yang saya dambakan ini adalah langkah awal bagi saya untuk memperoleh cita-cita yang telah saya impikan dari jauh sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis yang bernama Ali Sahban Nasution ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, bapak saya yang bernama Najamuddin Nasution dan ibu saya Nur Hatimah Harahap yang sangat saya cintai yang senantiasa selalu memberikan curahan kasih sayang dan telah mendidik, merawat, membesarkan saya dengan kesabaran yang cintanya tidak pernah pudar kepada saya, dan tidak pernah lupa dalam setiap lampiran doanya yang selalu diselipkan nama saya agar saya dapat meraih keberhasilan ini.
2. Kepada adik adik saya yang sangat saya cintai mereka itu Mega Hanifa Nasution, Inra Ariansyah Nasution, Ressa Dwi Arti Nasution yang selalu melemparkan senyum atas keberhasilan saya dan selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara Saudara beserta Sahabat saya yang selalu mendukung saya ketika saya letih dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Teman teman seperjuangan saya khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, dengan mereka saya menangis dan tertawa bersama khususnya Angkatan 2016 As b.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dalam skripsi ini yang bernama Ali Sahban Nasution, dibesarkan di desa Sibatuloting, kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, penulis lahir pada tanggal 01 Desember 1997 merupakan putra pertama dari empat bersaudara pasangan Najamuddin Nasution dengan Nur Hatimah Harahap.

Riwayat pendidikan penulis:

1. SDN (Sekolah Dasar Negeri) Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, lulus pada tahun 2009
2. MTS (Madrasah Tsanawiyah Swasta) di Pondok Modern Al-Abraar, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lulus pada tahun 2012.
3. MAS (Madrasah Aliyah Swasta) di Pondok Modern Al-Abraar Siondop Julu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Kemudian melanjutkan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan mengambil ilmu pada Jurusan Al-Ahkwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada Tahun 2016.

Bandar Lampung, 14 Februari 2020
Yang membuat,

Ali Sahban Nasution

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah serta puji syukur kepada Allah swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, oleh karena nikmat tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan MA No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama di Tinjau dari Pendapat *fuqaha***” dengan baik. Shalawat beriring salam kepada manusia terbaik yang dipilih langsung oleh Allah Swt. yaitu Nabi Muhammad saw, dan juga shalawat kepada keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan *syafa’at*-nya pada hari kiamat akhir nanti.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu hukum syariat Islam khususnya hukum perdata Islam.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu tak lupa penulis memberi ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khoiruddin Tahmid M. H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. H. Rohmat, S.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Abdul Qasir Jaelani S.H, M. H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung.

4. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. selaku pembimbing I, Dr. H. Khoiruddin Tahmid M. H., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang meenyumbangkan ilmunya dan telah mendidik dan membimbing selama mengikuti perkuliahan.
6. Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah ikut serta dalam memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan hubungannya dengan akademik.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2018

Penulis,

Ali Sahban Nasution
1621010118

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Signifikansi Penelitian	10
G. Tujuan Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT *FUQAH*A

A. Perkawinan beda agama menurut <i>fuqaha</i>	
1. Defenisi Perkawinan (<i>zawaj</i>) dan nikah	19
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	22
3. Rukun Perkawinan	27
4. Syarat Perkawinan	40
5. Perkawinan Beda Agama	43
a) Menurut <i>fuqaha</i> klasik	44
b) Menurut <i>fuqaha</i> kontemporer	49
6. Dampak Perkawinan beda agama	55
7. Pencatatan Terhadap Perkawinan beda agama	65
B. Tinjauan Pustaka	68

BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt TENTANG PENGABULAN PERMOHONAN BEDA AGAMA

A. Duduk Perkara dan Para Pihak	72
B. Deskripsi Data Para Pemohon	73
C. Alasan Permohonan Pemohon	75
D. Pertimbangan dan Isi Putusan dalam Perkara	77

BAB IV ANALISIS

A. Alasan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Ijin Nikah Beda Agama dalam perkara No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt	87
---	----

- B. Pandangan *fuqaha* terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang
Nikah Beda Agama dalam perkara No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt.....95

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan104
B. Rekomendasi.....104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan arti dan makna dari judul penulis tersebut, dengan tujuan menghindari kesalah pahaman tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dari judul skripsi ini yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama di Tinjau dari Pendapat *Fuqaha* Klasik dan Kontemporer”. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini adalah:

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.²

Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (perubahan ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA antara lain :

¹Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus esar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1995), h. 32.

² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 49.

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota Hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi *grasi* dan *rehabilitasi*.³

Permohonan adalah tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan karena ada hak-hak yang tidak ia dapatkan. Permohonan menurut para pakar hukum antara lain :

1. Menurut Sudikno Mertokusumo permohonan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*).⁴
2. Menurut Darwin Prints, gugatan atau permohonan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa orang lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat (Pemohon) melalui putusan pengadilan.⁵

Nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan

³ Ahmad Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015, h. 124.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Edisi Ke 7, Yogyakarta : Liberty, 2006, h. 29.

⁵ Darwin Prints, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *Kapita Selekta Permasalahan Hukum Acara Perdata*, 1992. ,h. 133.

disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya.⁶

Tinjaun adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷

Fuqaha adalah kata majemuk bagi *faqih*, yaitu seorang ahli *fiqh*. *Fiqh* adalah bidang *jurisprudence* atau hukum-hukum yang menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan, atau didalam konteks sosial umat islam.⁸

Dari penjelasan makna judul tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian diatas makna judul skripsi ini adalah memerikan pemahaman serta pengertian kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya bahwa perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan yang telah melanggar rambu-rambu peraturan agama Islam, adapun perbedaan pendapat para *fuqaha* merupakan alasan yang menitikberatkan kepada *maslahat* agama Islam khususnya kepada penganutnya. Akan tetapi melihat dari sisi *pluralisme* di Indonesia yang sangat beragam khususnya dalam keyakinan beragama sehingga Hakim-hakim pengadilan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memasuki permasalahan ini, dimana hukum permasalahan perkawinan beda agama merupakan perkara yang belum diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang, dan sehingganya masyarakat yang olehnya terjadi kekosongan hukum

⁶Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung : CV. Team Ms Barokah, 2015, h. 1-5.

⁷ Komaruddin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2002, h. 43.

⁸<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari kamis tanggal 4 april 2019.

dapat masuk kecelah itu dengan ruang pintu *yurisprudensi* yang telah ditetapkan oleh hakim-hakim Pengadilan.

B. Alasan memilih judul

1. Alasan objektif

- a) Penulis ingin mengetahui dengan jelas tentang pentingnya hukum menikah, khususnya hukum menikah bagi mempelai pria dan wanita yang menganut kepercayaan agama yang berbeda, serta alasan-alasan di kabulkannya pernikahan nikah beda agama oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt.
- b) *Yurisprudensi* Mahkamah agung ini sangat menarik untuk di analisis, dimana hukum nikah beda agama dalam perspektif Islam maupun perspektif Kristen dilarang untuk melangsungkan pernikahan yang menganut kepercayaan agama yang berbeda.
- c) Penulis ingin mengupas lebih detail tentang bagaimana pendapat para *fuqaha* tentang pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

2. Alasan subjektif

- a) Pokok bahasan ini sangat sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di fakultas Syari'ah dan Hukum Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b) Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan di teliti sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya dari bahan-bahan serta literatur yang di perlukan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan dan jurnal-jurnal terkait.

C. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak di benarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang di kehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang undang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pernikahan menyatakan :
“Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing -masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 2 Undang Undang Pernikahan ini terang menunjukkan paling pertama kepada hukum masing masing agama dan kepercayaannya bagi masing masing pemeluknya. Sedangkan menurut penjelasan pasal 2 ini. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang 1945.⁹ Oleh Hazairin, di tegaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri, beliau menambahkan lagi. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau “Hindu Buddha” seperti yang di jumpai di Indonesia. Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama sebagaimana disebut dalam al- Qur’an Surah Al- Baqarah ayat 221. Dari sudut pandang agama Kristen pun dapat di lihat dengan tegas dalam nasehat *al kitab* mereka dalam Perjanjian Baru (2 Korintus 6:14) segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan dalam kitab Undang Undang Hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*). Ordonansi

⁹Nasir Muchtar, K. H. *Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan suatu tindakan Administratif*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam (Seminar), h. 9.

Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI). Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde huwelijken*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku (pasal 66).¹⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 tanggal 2 Agustus 1986 Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia Tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan (Dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki Musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan Mutlak). Dan kemudian jika dilihat keputusan seminar perkawinan antaragama di Universitas Katholik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, pada prinsipnya Gereja melarang perkawinan campur antaragama (KHK 1086 dan KHK 1124).¹¹

Di dalam kitab-kitab *fiqh* umumnya, perkawinan antar pemeluk agama ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita *kitabiyah*, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita *kitabiyah*, karena wanita *kitabiyah* berpedoman kepada kitab yang aslinya berasal dari wahyu Allah. Pemahaman tekstual ini didasarkan kepada QS Al-Maidah(5):5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, h. 194.

¹¹*Ibid*, h. 195.

Artinya: “*Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian, bila kalian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi*”.(QS. Al-Maidah:5)

Terhadap ayat tersebut al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi’i, kebolehan laki-laki mengawini wanita *kitabiyah* tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur’an. Namun, setelah Al-Qur’an turun dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk sebagai *ahli kitab*. Menurut tiga mazhab lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita *kitabiyah* bersifat mutlak, meski agama *ahli kitab* tersebut telah dinasakh.¹²

Tidak diketahui secara tegas apakah Kompilasi Hukum Islam lebih mengacu kepada QS Al-Baqarah (2):221 tersebut, yang mempertanyakan masihkah originalitas wanita *kitabiyah* seperti yang dimaksud Taurat dan Injil? Pertanyaan ini memang terasa sulit untuk dijawab, untuk tidak mengatakan tidak mungkin.¹³

Ulama berbeda pendapat tentang perkawinan penganut agama yang berbeda-beda, terutama terkait dengan status calon istri atau suami tersebut

¹²Al-Nawawy, *al- Tafsir al-Munir li Ma’alim al- Tanzil*, juz 1, (Semarang; Usaha keluarga, tt.), h. 192.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua (Jakarta: Rajawali Pers), h. 275.

sebagai *musyrik*, *Atheis*, atau *Ahlul Kitab*. Dalam tafsirnya, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad Saw sebagai Rasul.¹⁴ Sementara itu, dengan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat dan hadist, para ulama sangat menekankan agama (*al-din*) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.¹⁵ Selain itu, hadist yang diriwayatkan Imam al-Bukhari yang menyatakan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat hal, tetapi hendaknya menjadikan agama sebagai pegangan.¹⁶ Dari beberapa hadist tersebut, al-Maraghi berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya bagi ummat Islam untuk menjalin hubungan perkawinan dengan orang-orang Musyrik, baik itu memperistri atau mengambil suami, karena seorang istri akan menjadi kepercayaan suami, yang diberikan amanah atas jiwa, anak, dan hartanya, dan hal ini tidak terwujud hanya dengan kecantikan semata. Seseorang yang Musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, tidak akan ada penghalang baginya untuk berbuat khianat, berbuat kebajikan, dan mencegah kejahatan.¹⁷ Terkadang justru akan mengkhianati suaminya dan merusak keyakinan anak-anaknya.

Sehubungan dengan ini, Direktur Pembinaan Peradilan Agama Depag RI (saat ini Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI) pernah meminta kepada Kantor Catatan Sipil untuk tidak mencatatkan perkawinan antara umat Islam

¹⁴Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halbi, tt), juz II, h. 153.

¹⁵Beberapa hadist Nabi dapat dilihat dalam Muhammad Ibn Yazid ibn ‘Abd Allah, *Sunan ibn Majah*, juz. I, hadist nomor 1859, h. 597.

¹⁶Lihat dalam al-Bukhari, *Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar*, juz. VII, Hadis nomor 5090, h. 7.

¹⁷Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi II*, h. 153.

dengan pemeluk agama lainnya.¹⁸ Setelah Undang-Undang Perkawinan munculpun masih terdapat putusan Pengadilan Negeri yang mengizinkan perkawinan antar pemeluk agama dan memandangnya sebagai perkawinan campuran seperti diatur dalam Pasal 60-62 Undang-Undang Perkawinan.¹⁹ Selain itu, setelah Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan, terdapat fenomena baru dalam pernikahan beda agama ini. Seperti perkawinan beda agama dilaksanakan dengan salah satu pihak masuk agama pihak lain, baik secara formalitas dengan perubahan identitas agama dalam KTP-maupun masuk agama dengan sesungguhnya. Masuk agama secara formalitas terjadi jika kedua pihak ingin tetap mempertahankan agamanya.²⁰

Permasalahan ini memang bukanlah perkara baru yang muncul ke permukaan, akan tetapi permasalahan nikah beda agama merupakan lagu lama yang sering terulang sampai dewasa kini, khususnya dalam permasalahan perkara ini, dimana pihak Pemohon merupakan agama Kristen yang dalam kategori al-Qur'an masuk kepada kategori *ahli kitab* seperti yang dijelaskan dalam ayat diatas, akan tetapi pertanyaan tentang masih *original*-kah agama Kristen saat ini? khususnya para kaum wanita *ahli kitab* yang menganut kepercayaan itu masih di pertanyakan, sedangkan pihak termohon merupakan penganut kepercayaan agama Islam, permasalahan dari kasus ini terletak pada pihak termohon yang merupakan penganut agama Islam. Dari penelitian penulis secara subjektif adalah hukum yang berlaku kepada termohon selaku penganut agama Islam. Merujuk kepada perjalanan sejarah pernikahan di

¹⁸Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah : Kapita Selektu Hukum Islam*, hal: 9.

¹⁹*Ibid*, hal: 3.

²⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal: 246.

Indonesia, permasalahan nikah beda agama memang belum di atur dalam Undang Undang Perkawinan, sehingga ruang bagi mereka yang kurang memahami agama dan ajarannya mencari celah untuk masuk ke ruang tersebut.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis fokus terhadap masalah *yurisprudensi* Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama, kemudian penulis mengupas pendapat serta pandangan *fuqaha* di jaman klasik dan sekarang (kontemporer) dimana masalah tersebut pada dasarnya sesuai dengan jurusan yang penulis ambil, skripsi ini membahas pada area perkawinan beda agama dan nantinya ditinjau dari beberapa pendapat *fuqaha* dan pembahasannya merupakan sub-sub fokus penelitian.

E. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung sehingga mengabulkan permohonan nikah beda agama tersebut ?
2. Bagaimana pandangan *fuqaha* klasik dan kontemporer terhadap perkawinan beda agama tersebut ?

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dan agar nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim khususnya masyarakat, sehingga dapat memecahkan batu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat serta sarjana fakultas syari'ah dan hukum, khususnya jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah tentang pernikahan beda agama.

G. Tujuan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan nikah beda agama dalam perkara No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. tersebut
- b) Untuk mengetahui pandangan *fuqaha* tentang pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam.

H. Metode penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus.²¹ Penelitian ini melandaskan pada penekanan pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “*frame of refremse*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta mendapatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Holistik). Dan konsep dalam penelitian ini adalah Abstaraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²²

²¹Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 100.

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 19.

1. Jenis dan sifat penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analitik*. Penelitian *descriptive* adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti.²⁴

2. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

10. ²³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.

²⁴Zulganef, *Metode Penelitian sosial dan bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11.

a) Bahan hukum primer

Yaitu sumber data yang paling utama, yang di jadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan, bahan hukum primer penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari refrensi, buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier antara lain : yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Enslikopedia.

3. Metode pengumpulan data

a) Mengadakan penelitian melalui buku-buku refrensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

b) Mengumpulkan data-data dari buku cetak, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang memuat masalah putusan Mahkamah Agung mengenai pengabulan nikah beda agama, terutama dalam buku-buku Islam yang memuat tentang pendapat beberapa *Fuqaha* tentang permasalahan yang di bahas.

c) Mengklarifikasi data-data yang terdapat dalam buku-buku refrensi.

4. Metode pengelolaan dan Analisis data

a) Metode pengelolaan data

Dalam metode pengelolaan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu metode antara lain yaitu:

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran data yang terkumpul melalui studi pustaka, data dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan dan tanpa masalah.

2) Rekonstruksi data

Rekonstruksi adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3) Penyusunan dan sistematika data

Penyusunan dan sistematika data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.²⁵

b) Metode Analisis Data

Selanjutnya setelah data yang diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif yaitu :

1) Metode deduktif, yaitu cara berpikir berangkat dari pengalaman yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengertian umum kita

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

hendak meneliti sesuatu kejadian-kejadian yang bersifat khusus.²⁶

Yang penulis maksud dengan metode ini adalah mengambil pengertian yang bersifat umum, kemudian diberi pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam beberapa bab sampai ditemukannya beberapa kesimpulan yang bersifat khusus.

- 2) Metode induktif, yaitu dengan cara berpikir dari fakta-fakta peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum, maksudnya yaitu mengemukakan faktor yang bersifat khusus terlebih dahulu kemudian dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mula-mula dengan mengemukakan faktor-faktor yang bersifat khusus kemudian dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

²⁶Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1995, h. 36.

²⁷*Ibid*, h. 37.

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT *FUQAHA*

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Pendapat *Fuqaha*

Pembahasan perkawinan beda agama ini akan menjelaskan lebih spesifik pada perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam yaitu merujuk kepada pendapat serta pandangan para *fuqaha* klasik dan kontemporer mengenai perkawinan beda agama, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkawinan beda agama penulis klasifikasikan perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga bagian:

1. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah
2. Perkawinan antara laki-laki non muslim dengan wanita muslimah, dan
3. Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl kitab*.

Perkawinan beda agama tersebut yang akan penulis kupas dalam skripsi ini sehingga nanti pembaca dapat memahami lebih jelas tentang hukum perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim (*musyrik*) adalah haram, as Shabuni mengatakan bahwa haram mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi.¹

¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, cetakan pertama, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985), h. 236.

Perkawinan beda agama ini memang terdapat sebuah pembedaan yang menimbulkan penekanan pada hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, sementara pengertian *ahli kitab* adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.²

Sebelum membahas tentang penjelasan perkawinan beda agama alangkah lebih baik menguraikan tentang pengertian perkawinan. Perkawinan merupakan persoalan yang penting dalam kehidupanberagama. Karena perkawinan mempunyai sifat bukan hanya sekedar ikatan per-*muamalatan* (*bottom up*), namun perkawinan juga meliputi dan merangkul dalam perkara dan persoalan ibadah (*top down*) sehingga hukum Islam mendefinsikan perkawinan dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). Berkaitan dengan pasangan yang kontroversial atau Perkawinan Beda atau perkawinan lintas agama dewasa ini tak jarang menimbulkan gejolak dan reaksi keras dikalangan masyarakat. Dalam dunia Islam, masalah ini menimbulkan perbedaan-perbedaan diantara kedua belah pihak *pro* dan *kontra*, masing-masing pihak memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang Perkawinan Beda Agama. Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan dan tanpa tujuan. Kemudian sebagaimana menurut Syahrur, demi menjaga perilaku yang lurus

²Masri Elmahsyar Bidin, *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Pandangan Islam*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya.

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran. Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Di dalam kitab *fiqh* umumnya, perkawinan antar pemeluk agama ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita *kitabiyah*, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Dalam diskursus dan permasalahan perkawinan beda agama dewasa ini dalam dilihat dari permasalahan yang terjadi, dalam hal ini dapat di

kategorikan: perkawinan laki laki non Muslim dengan wanita Muslimah, perkawinan laki laki Muslim dengan wanita non Muslimah, dan Perkawinan laki-laki non Muslim dengan wanita Ahli kitab.

Pernikahan beda agama yang dibahas di skripsi ini, harus dipahami sebagai gejala sosial yang terjadi setelah turunnya al-Qur'an hingga masa kini. pernikahan beda agama dalam hukum Islam, akan dijelaskan beberapa hal yang mendukung, yaitu :

1. Defenisi Perkawinan (*zawaj*) dan Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut *fiqh*, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a) Menurut Hanabilah: “Nikah adalah akad yang menggunakan lafaznikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.”³
- b) Menurut Sajuti Thalib: “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia”.⁴

³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986, h. 3.

⁴Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 2.

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT :

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ

Artinya: “Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.” (QS. Ad-Dukhan(44): 54);

Maksudnya, kami pasangkan mereka dengan bidadari. Atau jika dikatakan dalam bahasa Arab.”*Aku pasangkan antara unta*”, Maksudnya dipasangkan satu per satu. Dalam kitab *Taj Al-Arus* dikatakan : “*Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya*”. Lafal *az-zawaj* terdapat banyak dalam ayat-ayat Al-Qur’an dengan makna tersebut, diantaranya :

وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Artinya: “Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan”.(QS. At-Takwir: 7).

Maksudnya setiap jiwa berpasangan dengan orang yang dicintainya atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya. Kemudian menjadi populer penggunaan lafal *zawaj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu. Kata *az-zawaj* (الزَّوْجُ) dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid *waw* (زَوَّجَ) seperti

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain”. (QS. An-nisa (4) :20).

Maksudnya menempatkan wanita ditempat wanita yang lain artinya sepasang wanita. Bisa juga diungkapkan untuk dua orang atau

sepasang dua orang dalam bentuk *mutsanna*. Untuk membedakan antara pasangan wanita dan laki-laki dan untuk menghilangkan kesamaran *fuqaha* menggunakan kata *zawjah* untuk wanita dan inilah bahasa yang benar. Sebab dalam membagi harta warisan misalnya, jika menggunakan *zawj* atau *ibn*, tentu tidak diketahui laki-laki atau perempuan.⁵

Menurut syara', *fuqaha* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaji* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi dalam syariat Islam adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya yang disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat saat lelah dan tegang, keduanya melampiaskan kecintaan dan kasih sayang selayaknya suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

⁵*Lisan Al-Arab*, juz 3, hlm, 1886, *mukhtar As shahah*, hlm. 278, dan *Munjid Ath- Thullab*, hlm. 242

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum (30) : 21)

2. Tujuan dan Hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁶ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusannya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UI Press, 2000, h. 86.

pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya .
- 3) Memenuhi panggilan agama , memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.⁷

Menurut Khoirul Abror, dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan disadarkan kepada Al-Quran yaitu:

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

⁷Abdul Rahman Ghazali *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 58-59

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q. S. Ar rum: 21)

- 2) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam⁸, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”(Q. S. An nisa: 4)

- 3) Bertujuan ibadah, hal ini dapat dipahami dalam Q.S. az-Zariyat (51) ayat 56 yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q. S. Az-Zariyat: 56.)

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, yang berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk menata subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama . Fungsi keluarga menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal,

⁸Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M, 2015), h. 60.

ibu-bapak lah yang dikenal pertama kali oleh putra-putri nya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁹

Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁰

Adapun hikmah dari perkawinan merupakan sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Diantara ayat yang paling membentengi alasan tersebut yaitu :

⁹Wagianto “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan siri dalam Perspektif Politik Hukum*”,(Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Dipononegoro, 2010), h. 117.

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara 2004), h. 26-27.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(Ar-ruum: 21)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.

- c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.¹¹

3. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum.” Demikian pula menurut ulama fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum, dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.¹²

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab : *rakana, yarkunu, ruknan, rukunan* artinya tiang, sandaran atau unsur.¹³ Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang

¹¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: gita media press, 2006), h. 10-12.

¹² Abdul Azis Dahlan, *et. At., Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, cet. 4, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 2000), h. 1510.

¹³ *Ibid*, h.1510.

menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut.¹⁴

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, yaitu sebagian ulama berpandangan bahwa sesuatu itu merupakan rukun, tetapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa sesuatu hal itu tidak dimasukkan sebagai rukun, misal dalam hal whudu. Hal-hal yang disepakati sebagai rukun adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Hal hal yang dibedakan sebagai rukun adalah (a) niat, menurut mazhab Hanafi, niat tidak masuk kedalam rukun tetapi termasuk syarat. Bagi Jumhur ulama, niat adalah merupakan rukun;(b) tertib, yaitu mendahulukan sesuatu yang mesti didahulukan baru melakukan sesuatu yang kemudian. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tertib buksn rukun, tetapi *sunnah mu'akkad* (sunnah yang dipentingkan), sedangkan bagi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, tertib dalam whudu adalah rukun, berdasarkan Hadis Nabi saw. Bahwa Nabi Muhammad saw. Menyuruh memulai dengan apa yang dimulai Allah swt.; (c) berturut turut, yaitu tidak ada hal yang membatasi antara rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa berturut turut adalah bukan rukun, sedangkan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanballi berpendapat bahwa berturut turut adalah rukun; (d) menggosok-gosok anggota whudu dengan tangan, sesudah disiram air dan sebelum air kering dari anggota whudu.

¹⁴*Ibid*, h. 1510.

Menurut Jumbuh ulama berpendapat adalah sunnah, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah rukun.¹⁵

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut pasak 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama masing masing. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum yang terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.

Berdasarkan hadist Rasulullah saw. Dalam kitab *al-Bahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa :

*“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki laki, ‘aqid yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.”*¹⁶

¹⁵*Ibdi*, h. 1510-1511

¹⁶Al- Mubarak, *Nai lul Authar...op. ci t.*, h. 2183.

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum, kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

Salah satu contoh dampak sah atau tidak sahnya perkawinan adalah terhadap sah atau tidak sahnya hubungan hukum antara anak, yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan ibu dan ayahnya yang mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya adalah menjadi sah pula.

a) Calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya. Menurut hadits Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Buhkari, dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: “Jangan kamu menikahi seorang gadis sampai ia dinikahkan (oleh walinya) dan janganlah kamu menikahi seorang janda sampai mendapatkan ijinnya, mereka berkata: wahai Rasulullah bagaimana ijinnya ? Rasul bersabda: “dia diam (diam adalah ijinnya)”.¹⁷

Meskipun asas kerelaan dan asas persetujuan dalam hadis itu mengenai perempuan, juga berlaku untuk calon mempelai laki laki. Asas kerelaan dan asas persetujuan serta asas kebebasan memilih pasangan untuk emlakukan perkawinan baik seorang laki laki dapat dilihat dari ketentuan hadis Rasulullah saw. Tentang peminangan.

Dalam budaya Islam, biasanya yang melakukan pelamaran atau peminangan adalah pihak laki laki kepada pihak perempuan, sebagaimana di riwayatkan Bukhari dari ‘Urwah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. Meminang Aisyah melalui Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Lalu Nabi saw. Bersabda : “*Engkau saudaraku dalam Agama Allah dan kitab- Nya, sedang ia (Aisyah) halal bagiku*”.¹⁸

Demikian pula dalam hadis lain diriwayatkan bahwa yang melakukan peminangan itu adalah pihak laki laki, antara lain dalam hadis yang melarang melakukan peminangan terhadap

¹⁷*Ibid.*, h. 2161.

¹⁸*Ibid.*, h. 2136.

perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Muslim dari ‘Uqbah bin Amir, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda :

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَتَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: “Orang mukmin itu saudara yang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya, sehingga saudaranya itu meninggalkannya.”¹⁹

Kedua hadist tersebut menunjukkan bahwa lelaki yang melakukan peminangan berarti ia rela, setuju, dan bebas memilih pasangan perkawinannya, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peminangan sebagaimana hadist tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah (1) ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama; (2) mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Perkawinan; (3) ia telah berumur 19 tahun.

b) Calon mempelai perempuan

¹⁹*Ibid.*, h. 2137-2138.

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam Hadist Rasulullah Saw. Bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan *akad nikah*, sebagaimana dimuat dalam asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.

Dalam hadist yang diriwayatkan jamaah kecuali Bukhari, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa “Rasulullah saw. Bersabda :

لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: “Jangan kamu menikahi seorang gadis sampai ia dinikahkan (oleh walinya) dan janganlah kamu menikahi seorang janda sampai mendapatkan ijinnya, mereka berkata: wahai Rasulullah bagaimana ijinnya ? Rasul bersabda: “dia diam (diam adalah ijinnya)”.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, Muslim dan Abu Daud :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”²⁰

²⁰*Ibid.*, h. 2161.

Selain itu, syarat usia minimal calon mempelai perempuan harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi, karena jika calon mempelai perempuan tersebut ditentukan lebih dari 16 tahun akan membawa ke-*mudaratan*, berhubung saat ini banyak hal dan kondisi yang menjerumuskan seorang gadis dan bujang berbuat maksiat, hubungan seksual di luar perkawinan, misalnya disebabkan adanya jaringan internet *facebook* yang telah banyak menelan korban keimanan dan kegadisan seorang dara.²¹

c) Wali nikah

Ketentuan-ketentuan hadist Rasulullah saw. Tentang kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam status hukum perkawinan. Menurut hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra. dari Nabi saw., bahwa “beliau bersabda ;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali.”²²

Hadist lain yang menentukan kedudukan wali sangatlah penting dalam perkawinan adalah hadist yang diriwayatkan Imam yang lima kecuali Nasa’i dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda bahwa:

²¹Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*. Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika. 2012), h.109- 110.

²²Al- Mubarak, *Nailul Authar...op. cit.*, h. 2157.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”²³

Dalam hadist yang diriwayatkan ibn Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah ra., ia berkata, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ
نَفْسَهَا.

Artinya: “Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri.”²⁴

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pernikahan yang dinikahkan oleh wali perempuan adalah dilarang. Oleh karena itu, pendapat yang mendudukan perempuan dapat berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat berkedudukan sebagai wali nikah ataupun perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri adalah dilarang menurut hadist tersebut.

²³Ibid., h. 2161.

²⁴Ibid, h. 2157-2158.

Pendapat lain, menurut Ibnu Mundzir sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Nailul Authar*, dikemukakan oleh Abu Hanifah yang berpandangan bahwa wali nikah bukan merupakan keharusan secara mutlak (rukun) dalam perkawinan, sebab ada hadist yang mengemukakan bahwa:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: “Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya.”²⁵

Syarih Rahimahullah mengemukakan pendapat Ibnu Mundzir, bahwa yang dimaksud oleh hadist tersebut adalah tentang “Hak kerelaan perempuan janda itu”.²⁶

d) Saksi nikah

Dasar hukum tentang saksi-saksi nikah ditentukan dalam hadis hadis Rasulullah saw. yang menentukan bahwa saksi merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan akad perkawinan berlangsung.

Hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Imran bin Hushain dari Nabi Muhammad saw., bahwa:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

²⁵*Ibid*, h. 2159-2160.

²⁶*Ibid*, h. 2160.

Artinya: “*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*”²⁷

Dalam hadist tersebut ditentukan bahwa setiap perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Hadist berikunya yang menentukan saksi sebagai rukun yang wajib dipenuhi adalah hadist yang diriwayatkan Daruquthni dari Aisyah *radiallahu ‘anha*, bahwa “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kemudian jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak ada walinya.”²⁸

Demikian pula pendapat Imam malik berdasarkan hadist-hadist dari Abi Zubair Al-Maliki, bahwasesungguhnya kepada Umar bin Khattab pernah diajukan perkara mengenai perkawinan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi hanya disaksikan oleh seorang saksi lelaki dan seorang saksi perempuan, maka Umar menjawab, bahwa:

“*Ini perkawinan sirri, aku tidak memperkenankannya, dan kalau engkau melakukannya tentu ku-rajam.*”²⁹

Hadist umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan.

²⁷Al-Mubarak, *Nailul Authar...op. cit.*, h. 2171-2172.

²⁸*Ibid*, h. 2171.

²⁹Al-Mubarak, *Nailul Authar ...op. cit.*, h. 2171-2172.

Mengenai saksi nikah sebagai rukun nikah menentukan sahnyanya atau tidak sahnyanya perkawinan, menurut Sharih rahimahullah, adalahh berdasarkan hadis-hadis tersebut.³⁰ Menurut Tarmizi, salah seorang ahli hadist dari enam ahli hadis yang terkenal, mengemukakan bahwa saksi nikah itu berdasarkan hadis- hadis Rasulullah saw. adalah bersumber dari ulama pada masa sahabat-sahabt Rasulullah saw. dan pada periode berikutnya dari para *tabi'in* dan lain-lainnya, bahwa:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: “tidak ada nikah tanpa adanya saksi.”³¹

Pada masa ulama *muta'akhkhirin*, menurut Sahrih rahimahullah, muncul perbedaan pendapat mengenai perkawinan yang disaksikan “seorang saksi lelaki”, baru kemuidian “muncullah (datang) seorang saksi lelaki lainnya” sesudah akad nikah berlangsung. Sebagian ulama Kuffah berpendapat bahwa:

*“Tidak sah nikah, sehingga nikah itu disaksikan oleh dua orang saksi (lelaki) secara bersamaan pada waktu akad nikah berlangsung.”*³²

Sharih rahimahullahh juga mengemukakan bahwa pendapat ulama Madinah, bahwa ketika akad nikah berlangsung dapat disaksikan oleh seorang saksi lelaki, kemudian seorang saksi lelaki lainnya datang kemudian, asalkan akad nikah itu diumumkan

³⁰*Ibid.*, h. 2172.

³¹*Ibid.*, h. 2173.

³²*Ibid.*, h. 2173.

sebelumnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq, bahwa perkawinan dapat disaksikan oleh seorang lelaki dan dua orang saksi perempuan. Demikian la pendapat Tarmizi.

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat, sebagaimana dikemukakan oleh Sharih rahimahullah, bahwa:

- 1) Perkawinan yang diumumkan (dihadiri oleh orang banyak) adalah tidak diragukan keabsahannya. Akan tetapi,
- 2) Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi disembunyikan masih dipermasalahkan kedudukan hukumnya.
- 3) Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi lelaki kemudian juga diumumkan, maka keabsahan hukum tidak diperselisihkan, namun
- 4) Jika perkawinan itu disembunyikan dan tanpa saksi, maka perkawinan itu adalah batal.³³

Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, berpendapat bahwa perkawinan itu tidak sah jika tanpa saksi. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, sedangkan saksi nikah yang hanya terdiri atas perempuan saja adalah tidak sah.³⁴ Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

³³*Ibid.*, h. 2173.

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idus al-Kaff, cet. 1, (Jakarta : Lentera Basritama, 1996), h. 313.

berpendapat bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.³⁵

e) Ijab dan Kabul

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan saksi.³⁶

Qabul diucapkan oleh calon mempelai lelaki secara pribadi. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, ucapan *Qabul nikah* dapat diwakilkan kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki bersangkutan memberi kuasa yang jelas dan tertulis, bahwa penerimaan wakil atas akad nikah (*kaful*) itu adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini ditentukan dalam Pasal 29 KHI.

4. Syarat perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rahman.³⁷

a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam.

³⁵*Ibid.*, h. 314.

³⁶Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9., (Yogyakarta: Nur Cahaya, 2000), h. 26.

³⁷Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo, tt.) h. 31-32.

- 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama, meskiun Yahudi dan Nasrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Menyaksikan dalam *ijab qabul*.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.
- e) *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

- 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tajwij*.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/umrah.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Undang undang perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izinnya dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga

yang mempunyai hubungan darah segaris keturunan garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁸

5. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama pada dewasa ini bukan permasalahan yang baru muncul di permukaan, akan tetapi perkawinan beda agama ini sudah lama di permasalahankan dan bahkan perkara ini belum diundangkan dalam hukum positif Indonesia, dalam artian perkawinan beda agama secara hukum positif belum diatur dalam konstitusi Indonesia.

Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Musyrik mutlak mayoritas ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hukumnya adalah haram, dan sama halnya perkawinan beda agama antara laki-laki non

³⁸Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 6, h. 38.

muslim dengan wanita muslimah, namun permasalahan yang timbul dikalangan *fuqaha* adalah perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl kitab*.

Mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan Wanita *Ahli Kitab* adalah yang kontroversial dikalangan para *fuqaha* sejak zaman Sahabat. Pada prinsipnya,

a) Menurut *fuqaha* klasik

Seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita non Muslim kecuali wanita Ahli Kitab seperti yang disebut dalam surat Al Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمُ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al Maidah: 5)

Ibnul Mundzir berpendapat bahwa tidaklah benar bahwa ada yang melarang seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan *ahli kitab*. Kawin dengan perempuan *ahli kitab* sekalipun

boleh tapi hukumnya makruh. Karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan *ahli kitab* yang bermusuhan dengan kita (*harbi*), maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita.³⁹

Dalam salah satu riwayat hadist juga disebutkan: Dari Ibnu Umar, bahwa pernah ia ditanya orang tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan Nasrani atau Yahudi. Jawabnya: “*Allah mengharamkan orang-orang mukmin kawin dengan wanita musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhan*”.⁴⁰

Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama dan mempunyai Kitab Suci seperti kitab suci Daud yang bernama Zabur, maka halal kawin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik.⁴¹ Jadi mereka sama dengan golongan Yahudi dan Nasrani.

Sebagian dari *fuqaha* memiliki pendapat bahwa menikahi wanita non muslim *haram* hukumnya. Golongan Syafi'i dan sebagian golongan Hambali berpendapat bagi kita kaum Muslimin tidak halal kawin dengan perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Di samping itu kitab-kitab dari umat sebelum kaum Yahudi dan Nasrani isinya sekedar nasehat dan perumpamaan,

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*”, (Bandung, PT. Al Maarif 1980), h. 151.

⁴⁰Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1989, h. 232.

⁴¹Muhammad, *Fikih Empat Mazhab*, h. 78.

dan sama sekali tidak berisi masalah hukum. Oleh karena itu tidaklah kitab-kitab suci diatas dapat disebut sebagai kitab-kitab suci yang berisi syari'at.

Para ulama pun juga telah sepakat bahwa orang Islam tidak boleh mengawini wanita-wanita Musyrik, wanita Atheis, dan wanita Murtad tanpa adanya pengecualian. Adapun di sini pendapat dari para ulama mengenai adanya Perkawinan Beda Agama tersebut adalah dimulai dari pendapat Maududi ia menerangkan bahwa Imam Abu al-A'la al-Maududi menyatakan kawin dengan wanita Kitabiyah, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itu pun makruh hukumnya. Di sana ada sebagian ulama yang mengharamkan hal tersebut. Hukum yang telah disepakati bersama adalah tidak bolehnya wanita Muslimah kawin dengan laki-laki non Muslim.⁴²

Adapun pendapat *Sayyid Quthb* di sini menjelaskan bahwa dalam perkawinan, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhi, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Hal yang demikian itu masih banyak masyarakat yang terkecoh dalam masalah kepercayaan agama sehingga mereka menduga bahwa masalah akidah (kepercayaan agama) ini hanyalah perasaan yang ada dalam

⁴²Asnawi, *Perkawinan Beda Agama*, diakses dari: <http://asnawiihsan.blogspot.com/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>, pada tanggal 21 agustus 2019.

jiwa dan dapat diganti dengan beberapa filsafat ataupun beberapa aliran sosial.⁴³

Adapun pendapat para jumhur ulama yang lain menjelaskan bahwa wanita *kitabiyah* yang mempercayai trinitas, termasuk dalam kategori *ahlul kitab* yang disebutkan dalam ayat tersebut. Akan tetapi menurut para jumhur ulama tersebut dalam hal ini lebih cenderung untuk mengikuti pendapat yang mengharamkannya menikahi wanita *Kitabiyah* yang memiliki akidah trinitas tadi.⁴⁴

Selain itu seorang suami Kafir tidak mau tahu akan agama isterinya yang Muslim bahkan ia mendustakan kitab sucinya dan mengingkari ajaran Nabinya. Di samping itu dalam rumah yang terdapat perbedaan paham begitu jauh dan keyakinan begitu prinsip, maka rumah tangganya tidak akan dapat tegak dengan baik dan berjalan langgeng.⁴⁵

Akan tetapi hal ini akan berbeda jika laki-laki Muslim kawin dengan perempuan *ahli kitab*, sebab ia mau tahu agama isterinya, dan menganggap bahwa percaya kepada Kitab Suci dan nabi-nabi agama isterinya sebagai bagian daripada rukun iman. Di mana keimanan Islamnya ini tidak akan sempurna kalau tidak mempercayai kitab dan para nabi *ahli kitab*.⁴⁶

Tentang dibolehkannya pernikahan dengan non Muslim, terdapat para sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen dan

⁴³Asnawi, *Perkawinan Beda Agama*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2003), h. 56.

⁴⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1994), h. 196.

⁴⁵*Ibid.* h. 201.

⁴⁶*Ibid.* h. 211.

Yahudi, antara lain: Hudzayfah, Thalhah. Khalifah Umar sempat berang dan marah tatkala mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar yang seperti itu sebenarnya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan hanya khawatir. Barangkali Umar khawatir apabila sewaktu-waktu para sahabat membelot dan masuk dalam komunitas non-Muslim. Hudzayfah dan Thalhah merupakan kedua tokoh yang menonjol pada zamannya, sehingga wajar bila Umar mengingatkan mereka berdua.⁴⁷

Imam Syafi'i memahami istilah Ahli kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau diantaranya bahwa Nabi Musa dan Isa, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa lain (juga adanya redaksi *min qablikum* (sebelum kamu) pada ayat yang memperbolehkan perkawinan itu). Pendapat imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahli kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁴⁸

⁴⁷Asnawi, *Perkawinan Beda Agama*, *Ibid*, h. 34.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Miza n 1997), ha l: 330.

b) Menurut *fuqaha* kontemporer

Perkawinan beda agama ditinjau dari ulama kontemporer berarti menjelaskan tentang pandangan *fuqaha* di zaman sekarang mengenai perkawinan beda agama. Salah satunya adalah Quraish Shihab melarang atas perkawinan tersebut, adapun dasar hukumnya yang digunakan untuk ber-*istimbath* atas permasalahan itu terdapat dalam surat al-Baqarah (2):221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Q. S. Al-baqarah: 221)

Pandangan serta pemikiran Quraish Shihab mengenai ayat tersebut bahwa apabila laki-laki Muslim mengawini seorang wanita *Ahl Kitab* masih diperbolehkan atau dalam kaidah hukum Islam dikategorikan sebagai *mubah*. Dalam hal ini Quraish Shihab berlandaskan kepada QS. Al-maidah (5) :5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al- Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”(Q.S. al-Maidah: 5).

Pada dasarnya dalam QS.Al-maidah (5):5 memberikan patokan bahwa adanya kebolehan untuk melaksanakan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita *Ahl al-Khitab*, Namun demikian sekalipun pria Muslim diperbolehkan untuk mengawini dengan wanita *Ahl-Kitab* hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya, yaitu Pria *Ahl-Kitab* diperbolehkan menikah dengan wanita Muslimah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Mumtahanah ayat 10 yang melarang perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria kafir (baik golongan ahl-Kitab maupun Musyrik) ⁴⁹ yang artinya:

⁴⁹Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah III, (Jakarta: Lentera , 2003), hal: 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا
أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q. S. Al-Mumtahanah: 10).

Selain itu QS. Al-Baqarah ayat 221 juga menegaskan secara jelas larangan para wali untuk menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki Musyrik yang artinya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik pria dengan (wanita-wanita muslimah) sampai mereka (pria-pria musyrik) itu beriman”(Q. S. Al Baqarah: 221)

Dalam konteks lain Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa al-Qur'an telah membedakan antara Ahl Kitab dengan Musyrik sebagaimana firman Allah QS. Al-Bayyinah(98):1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: “Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (Al-Bayyinah(98):1)

Ayat di atas dapat dipahami dari huruf waw membedakan orang-orang Kafir menjadi dua yaitu *ahl-kitab* dan orang Musyrik, perbedaan ini pada ayat di atas.⁵⁰ Istilah Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama seorang Musyrik adalah siapa yang percaya ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktifitas dengan tujuan ganda, yang pertama untuk Allah yang kedua untuk yang lainNya.⁵¹

Sedangkan yang dimaksud dengan *ahl kitab* menurut Quraish, itu mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada QS. Al-maidah(5):5 yang dimaksud wanita-wanita yang menjaga kehormatannya merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dikawini adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita Mukmin maupun *ahl al-kitab*. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utul kithab*, dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti merdeka atau yang terpelihara kehormatannya, atau yang sudah kawin. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita *mukminah* memberi

⁵⁰*Ibid*, h. 29.

⁵¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* III, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 442.

isyarat bahwa mereka yang harus didahulukan, karena betapa pun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Pemahaman dan pendapat beliau tidak serta merta menafsirkan untuk memperbolehkan perkawinan Muslim dengan wanita *ahl kitab* kecuali dengan kriteria sebagai berikut: pertama, *ahl kitab* itu harus benar-benar berpegang pada agama *samawi*. Kedua, wanita *ahl kitab* tersebut adalah wanita *Muhshonaat*⁵², yaitu orang yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya.⁵³

Terhadap surah Al- Maidah ayat 5 al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, kebolehan laki-laki mengawini wanita *kitabiyah* tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Namun, setelah Al-Qur'an turun dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk sebagai *ahli kitab*.⁵⁴

Namun pada pendapat yang lain yaitu pendapat yang mencoba menyampaikan dan menguraikan pendapat yang moderat. Golongan ini berpendapat bahwa perkawinan dengan wanita *ahli kitab* hukum asalnya adalah halal, akan tetapi dalam situasi dan kondisi menghendaki ketentuan lain terutama yang konteks sosial dan

⁵²Makna dari kata *muhshanat* adalah wanita yang menjaga kesuciannya

⁵³Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah I*, (Jakarta : Lentera , 2003), h. 209.

⁵⁴Al-Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al- Tanzil*, juz 1, (Semarang; Usaha keluarga , tt.), h. 192.

politik karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami istri dan anak-anak. Argumentasi yang dibangun oleh golongan ini antara lain pendapat sahabat Nabi:

- a) Sayyidina Umar pernah berkata kepada sahabat yang menikahi wanita ahli kitab: *“ceraikanlah mereka!”*. Perintah umar ditaati oleh sahabat tersebut, kecuali huzdaifah ibnu Al-yaman. Maka umar mengulangi lagi perintah agar huzdaifah menceraikan isterinya. Lantas huzdaifah berkata: *“Maukah engkau menjadi saksi bahwa mereka haram!”*. Umar menjawab dengan singkat *“Dia akan menjadi fitnah”*. Ceraikanlah !*“kemudian huzdaifah berkata lagi ” Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia adalah haram?”* Umar menjawab lagi *“ia adalah fitnah”* akhirnya huzdaifah berkata *“sesungguhnya aku tahu ia fitnah, tetapi ia halal bagiku”*, maka setelah huzdaifah meninggalkan Umar, ditalaklah isterinya. Lantas huzdaifah ditanya orang: *“mengapa engkau talak isterimu itu ketika diperintah umar?”* jawaban Huzdaifah: *“Karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak”*. Pada kesempatan lain Umar berkata kepada Huzdaifah *“bila orang-orang Islam suka mengawini wanita-wanita kitabiyah, maka siapa yang akan mengawini wanita Islam”*.
- b) Adanya kekhawatiran pada laki-laki yang akan terikat hatinya pada isterinya, apabila setelah mereka memperoleh keturunan.

- c) Karena dalam Islam perkawinan menghendaki terwujudnya ketentraman dan ketenangan (*sakinah, mawaddah, waromamah*). Maka pertanyaannya apakah dua orang yang memiliki keyakinan agama dan keterikatan primordial yang berbeda berlabuh dalam satu ikatan rumah tangga akan dapat membangun ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya? Oleh karena itu pernikahan semacam ini memerlukan syarat-syarat dan kriteria-kriteria tertentu.⁵⁵

Kemudian pendapat ash Shabuni mengenai perkawinan beda agama dapat di simpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa haram mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi. *Kedua*, bahwa haram mengawinkan laki laki kafir (penyembah berhala dan *ahl kitab*) dengan wanita muslimah. *Ketiga*, bahwa boleh laki laki muslim mengawini perempuan *ahl kitab* (Yahudi dan Nasrani) apabila tidak ada kekhawatiran membahayakan (keimanan) anak-anaknya kelak.⁵⁶

6. Dampak Perkawinan Beda Agama

Agama merupakan keyakinan hidup paling mendasar yang memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan penganutnya. Bagi pasangan yang berbeda agama dan tetap mempertahankan keyakinan agama masing-masing dalam pernikahannya, tidak dapat dipungkiri tentu akan terjedai patokan dalam mengelola kehidupan perkawinan dan rumah tangganya. Bisa jadi, untuk menghindari pertentangan atau ketegangan

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan.....*, h. 335.

⁵⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam ash Shabuni*, cetakan pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989, h. 236.

dengan pasangannya, salah satu pihak bisa saja mengalah. Situasi seperti ini seringkali sulit untuk dipertahankan.

Yang mungkin terjadi adalah bila ada yang mau mengalah terus menerus bisa saja kemudian mengalahkan keyakinan agamanya sendiri dan akhirnya berpindah mengikuti keyakinan agama pasangannya. Perbedaan pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi salah satu factor penghambat untuk dapat mewujudkan kondisi ideal keluarga yang harmonis, tenang, dan tentram.

Meskipun keyataannya, pasangan yang mempunyai keyakinan agama yang sama juga masih mempunyai masalah dan hambatan dalam mewujudkan kondisi ideal perkawinan dan rumah tangga yang harmonis, tenang, dan damai.

1. Dampak terhadap anak yang dilahirkan

Secara rinci fungsi sebuah keluarga dalam pendidikan anak adalah untuk dapat menciptakan keturunan yang baik dan membesarkan anak. Dapat memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban. Untuk mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Dan untuk meneruskan atau mengajarkan adat istiadat, kebudayaan, agama, sistem moral kepada anak selaku generasi penerus dari sebuah keluarga.⁵⁷

⁵⁷Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1995), h. 30.

Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.⁵⁸ Begitu pentingnya eksistensi akan lambang penerus dan lambang keabadian ini, maka Allah SWT mensyari'atkan ada pernikahan. Pensyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindari diri dari penyakit dan menciptakan keluarga sakinah.⁵⁹ Pernikahan beda agama yang terjadi antara dua insan manusia, tentunya memiliki dampak atau implikasi pada status anak dikemudian hari. Implikasi tersebut dapat diidentifikasi dengan status anak yang bukan menjadi anak kandung, karena dalam pembahasan di atas hukum pernikahan beda agama dalam Islam adalah dilarang (*haram*).

Dalam pernikahan beda agama dampak yang akan terjadi terhadap anak hasil dari pernikahan tersebut. Anak yang dilahirkan belum dapat menentukan agama apa yang akan dianutnya. Namun, ajaran masing-masing agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Menurut tuntutan ajaran agama Islam, anak yang baru dilahirkan disunatkan untuk diazankan dan diqamatkan oleh ayahnya, selanjutnya dilakukan aqiqah dan pemberian nama yang baik sesuai dengan tuntunan Rasul. Pada agama Kristen dan Protestan peristiwa kelahiran anak diikuti oleh upacara pembaptisan anak yang baru lahir. Bagi pasangan yang berbeda agama tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntutan ajaran agama yang mana yang akan diikuti pada saat kelahiran anak mereka. Mungkin saja pasangan ini melakukan kesepakatan,

⁵⁸Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), h. 256.

⁵⁹Wahhab al-Juhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2,

misalnya anak laki-laki mengikuti agama ibunya, dan dilakukan dengan ritual agama pada anak menurut kesepakatan tersebut. Tetapi apakah pilihan agama untuk anak mereka dapat menghindari permasalahan pada anak tersebut dikemudian hari. Misalnya, yang terkait dengan masalah wali pernikahan, wari, dan sebagainya.

2. Dampak terhadap Pendidikan Anak

Istilah pendidikan anak dalam keluarga, secara etimologi para pakar menaruh perhatian besar untuk menerangkan. Pendidikan anak adalah badan atau organisasi termasuk organisasi yang paling kecil sekalipun yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan usaha pendidikan bagi anak-anak.⁶⁰ Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua bagi anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik kodrati, karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan oleh Tuhan berupa naluri sebagai orang tua.⁶¹ Pendidikan hidup bersumber dari keyakinan agama pasangan yang berbeda agama kan menimbulkan “kebingungan” patokan yang akan dijadikan dasar dalam pendidikan anak. Apalagi pada anak-anak tersebut juga dilakukan penetapan agama yang berbeda pada anaknya, misalnya pada anak yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama islam, dia tentu perlu mendapatkan pendidikan agama Islam, bagaimana pendidikan agar anak dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam, menjalankan Shalat, berpuasa, dan ibadah lainnya. Sementara

⁶⁰ M. Nipon Abdullah Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 87.

⁶¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. V, h. 218.

saudaranya yang mengikuti agama ayahnya atau ibunya yang beragama Kristen, ia harus juga dididik agar dapat menjalankan ibadah dan aturan agama menurut ajaran agama Kristen. “Kebingungan” patokan dasar seperti itu akan terjadi dalam pendidikan anak di dalam keluarga yang berbeda agama.

Bila terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan yang prinsipil. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Keadaan demikian secara psikologis akan berperangaruh negatif pula pada perkembangan sosial si anak, besar kemungkinan anak akan menjadi korban sulit memilih pada agama siapa ia berpijak. Membiarkan anak memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama ditentukan oleh pendidikan sejak dini. Disamping itu, dalam kenyataannya pengaruh ibu terhadap anak sejak kecil jauh lebih besar dibandingkan ayah, karena itu anak lebih cenderung mengikuti keyakinan agama ibunya, apabila ayah kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan agama anaknya.

3. Dampak terhadap pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan

Harta peninggalan dari orang-orang yang telah meninggal dunia dapat dilihat dari dua jenis harta:

Pertama, jenis harta bersama, yakni harta yang didapat selama perkawinan, demikian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, sebagai berikut:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kedua, adalah harta peninggalan atau warisan. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-undang tersebut. Sedangkan pada Pasal 37 disebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dalam hal ini bila suami istri menganut agama yang sama tentu tidak masalah”.

Terkait aturan yang digunakan. Tetapi bila sebaliknya yakni suami dan istri tunduk pada hukum yang berbeda tentu akan dapat menimbulkan konflik diantara mereka.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ini terdiri dari 3 hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya Rakernas pada tahun 1985 yang diadakan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa apabila seorang pewaris meninggal, maka hukum waris dibagi menurut agama yang dianut oleh pewaris tersebut. Keadaan ini menimbulkan sengketa yang terjadi

antara keluarga dari pewaris yang telah meninggal. Salah satunya adalah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dimana salah satu anak dari orang tua yang telah meninggal tidak mau memberikan hak kepada ahli waris yang telah berpindah agama keyakinan Kristen. Hal serupa juga terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dimana ahli waris utama yaitu seorang janda tanpa anak digugat oleh ahli waris dari suaminya yang meminta harta warisan dibagi secara hukum Islam, padahal janda tersebut beragama Kristen.

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanyahukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W. yang berbunyi "Disampaikan dari Abu 'Asyim, dari Ibn Juraji, dar Ibn Syihan, dari Ali bin Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah S.A.W bersabda : tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim"⁶². Amin Husein juga berpendapat bahwa hadist dari rasulullah yang tersebut diatas yang menguatkan dan memberikan alasan mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim.⁶³

⁶²Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia..*Kencana.Jakarta. 2011, h. 78.

⁶³ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam.* Rajawali Pers. Jakarta.2012, h. 81.

Berdasarkan sejarah dari cerita nabi maupun hadist Rasulullah Saw. mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewarisan kepada orang yang berbeda keyakinan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ditegaskan secara jelas bahwa perbuatan itu dilarang. Tujuan kewarisan sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan.⁶⁴ Menurut Habiburrahman pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam namun juga bertentangan dengan tujuan dari syariat sendiri yang ini memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama.⁶⁵ Hal inilah yang menjadi alasan bahwanya Islam tidak memperbolehkan adanya pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Tuhan sehingga harus dipelihara seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Tuhan (Allah). Rasulullah Saw. sendiri juga bersabda bahwa harta warisan tersebut tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Hal ini sebagai mana sabda Rasulullah yang berbunyi “ tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan hanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadist Rasulullah Saw : tidak memudharatkan dan tidak dimudaratkan”.⁶⁶

4. Dampak terhadap gangguan hubungan terhadap perkawinan beda agama

⁶⁴Habi burrahman. *Op. Ci t*, h. 234.

⁶⁵ *Ibid*, h. 235.

⁶⁶ *Ibid*, hal: 71.

a) Aspek Psikologis

Masalah yang akan muncul terhadap pasangan suami-istri dari perkawinan beda agama, yang dapat berefek samping kepada anak-anak mereka, diantaranya memudarnya kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga beda agama semakin hari serasa semakin kering. Pada awal kehidupan mereka, terutama pada waktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh cinta. Akan tetapi dengan perjalanan waktu ternyata jarak itu tetap saja menganga.

Ada suatu kehangatan dan keintiman yang kian redup dan perlahan menghilang sehingga perbedaan yang tadinya harmonis terkalahkan dengan perbedaan agama. Pada saat semakin menapaki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari bukanlah materi, melainkan bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan, seketika itu tak ada, maka rasa sepi kian terasa, mungkin pada saat masih berpacaran lalu menikah dan belum punya anak, cinta mungkin diyakini dan dipercaya dapat mengatasi semua perbedaan, namun setelah punya anak berbagai masalah baru akan bermunculan. Bagi seorang muslim, ketika usia semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. Mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman.

b) Tujuan Berumah Tangga Tidak Tercapai

Agama itu dalam kiasan bahasa atau *analogi* ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa akan melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pada suatu kebahagiaan jika istri dan anak anaknya bisa ikut bersama, pada saat seorang suami (yang beragama Islam) pergi umrah atau haji. Kemudian jika ibu dari anak tersebut beragama Kristen lantas antusias dari seorang ibu pasti tidak setuju karena perbedaan kepercayaan mereka, merupakan suatu kesedihan ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja pada saat suami pergi umroh atau haji, salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam salat berjamaah bersama anak istri .

Demikian juga ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, akan merasakan hal yang sama, yakni merasa indah apabila melakukan kebaktikan di gereja bersanding dengan suami. Namun itu hanya keinginan belaka. Setiap agama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat

berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukar-menukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Kenikmatan berkeluarga ada yang hilang. Jadi, secara psikologis perkawinan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan. Ini tidak berarti perkawinan satu agama akan terbebas dari masalah.

c) Berebut Pengaruh

Dampak yang akan terjadi terhadap *mentalitas* dan *psikologis* orang tua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya. Perbedaan agama bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia selalu dipandang serius. Ada suatu kompetisi antara ayah dan ibu untuk memengaruhi anak-anak, sehingga anak jadi bingung. Namun ada juga yang malah menjadi lebih dewasa dan kritis. Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim. Kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua.⁶⁷

7. Pencatatan Terhadap Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa

⁶⁷Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta 2011, h. 55.

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaanya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam pasal 35 huruf a. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).⁶⁹ Berikut beberapa pasal UU Adminduk Pasal 34 UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 34 UU Adminduk :⁷⁰

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana

⁶⁸ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Simbi osa Rekatama Media, h. 67.

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528d75d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama> diakses pada tanggal 19 september 2019.

⁷⁰Hi mpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokusmedi a, 2011), h. 23.

ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan
2. Perkawinan (WNA) Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a:

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁷¹ Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP9/1975).

Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (yaitu KUA). Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁷²

B. Tinjauan Pustaka

⁷¹Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Literarti, 2014), h. 66.

⁷²*Ibid*, h. 67.

Fenomena Perkawinan Beda Agama selamanya akan menjadi hal yang selalu hangat dibicarakan karena masalah ini selain menyangkut masalah keperdataan antar manusia juga menyangkut masalah keyakinan. Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah Perkawinan Beda Agama diantaranya ada beberapa buku dan skripsi yang penulis temukan.

Di dalam Skripsi Rahma Nurlinda Sari Angkatan 2014 jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, dalam skripsinya tersebut menyatakan bahwa Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Kemudian dalam pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari'at Islam.⁷³

Penelitian dalam skripsinya Ahmad Hasan Mafatih tahun 2006 STAIN Surakarta yang berjudul *Perkawinan Antar Agama suatu Analisis Pandangan Muhammad Ali As-Shabuni tentang perkawinan Al Musyrikah dengan Ahl al-kitab* menjelaskan bahwa As Shabuni memperbolehkan laki laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab dan mengharamkan terjadinya

⁷³Skripsi , Rahma Nurlinda Sari , *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Di tinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, UIN Raden Intan Lampung, 2016.

pernikahan antara laki laki Muslim dengan wanita musyrik. Sedangkan pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki laki pemeluk agama lain baik laki-laki Ahl Al-kitab ataupun yang Musyrik adalah haram.⁷⁴

Kemudian telaah pustaka yang terdapat dalam skripsi Ratna Jati Ningsih, Program Studi Al-Akhwil Asyakhshiyah Jurusan syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang berjudul Perkawinan Beda Agama(Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah), dalam penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa Penafsiran Quraish Shihab mengenai Perkawinan Beda Agama antara seorang Muslim yang boleh menikah dengan wanita Ahl al-kitab namun tidak untuk sebaliknya, dengan dasar surat al-Maidah (5):5. Sedangkan perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik maupun sebaliknya, yang diharamkan atau dilarang, adapun dasarnya surat al-Baqarah (2):22.

Hal ini artinya bahwa sesungguhnya Quraish Shihab masih memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan wanita *ahl kitab*. Sedangkan yang dimaksud *ahl kitab* disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar ketentuan tersebut diharamkan. Adapun kebolehan tersebut harus diiringi dengan beberapa ketentuan misalnya wanita *ahl kitab* yang benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi (dengan kitabnya) dan wanita *ahl kitab* yang *muhsonat*. Sementara itu Quraish juga mengklaim bahwa kitab agama-agama samawi sebelum Islam yang saat ini masih ada sudah tidak lagi original. Oleh sebab itu kemungkinan diperbolehkannya menikah sebagaimana dimaksud di atas sangat kecil.

⁷⁴Skripsi Ahmad Hasan Mafatih, "Perkawinan Beda Agama Suatu Analisis Pandangan Muhammad Ali As-Shabuni tentang Perkawinan Al-Musyrikah dengan Al-Kitab", STAIN Surakarta, 2006

Relevansi produk *ijtihad* Quraish Shihab mengenai Perkawinan Beda Agama sangat linear dengan semangat masyarakat dan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis namun demikian masih tetap ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan Beda Agama di dalam Perundang-undangan Indonesia tidak diakui karena hal itu tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia.⁷⁵

⁷⁵Skripsi, Ratna Jati Ningsih, *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, IAIN Surakarta, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchtar, Nasir, *Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan suatu tindakan Administratif*. Jakarta, Dirjen Bimas Islam (Seminar).
- Ramulyo, Idris, Mohd, 1996. *hukum perkawinan Islam*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Al-Nawawy, *al- Tafsir al-Munir li Ma'alim al- Tanzil*, juz 1, (Semarang; Usaha keluarga, tt.).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua (Jakarta : Rajawali Pers).
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Perum Balai Pustaka).
- Muhammad, Farouk. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press,
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara,.
- Zulganef, 2013. *Metode Penelitian sosial dan bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Komaruddin, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ubaedillah, Ahmad, 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Pancasila, demokrasi, dan pencegahan korupsi*, Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Nasruddin, 2015. *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung : CV. Team Ms Barokah.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres.
- Ramli, Fathoni, Ramli, 2013. *Administrasi Peradilan Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7*, Yogyakarta : Liberty.
- Maraghi, al-, Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir : Mustafa al-Maraghi al-Babi al-Halbi, tth.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, 1985, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, cetakan pertama, (PT. Bina Ilmu, Surabaya,

- Zuhdi, Masjfuk, 1987. *Masail Fiqhiyyah*,: Kapita Selektta Hukum Islam. Jakarta : Gunung Agung.
- Kharlie, Tholabi, Karlie, 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulganef, 2013. *Metode Penelitian sosial dan bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Kadir, Abdul, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno, 1995. *Methodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. 2015 *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali, Zainuddin, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muh. Jawad Mughniyah, 2004. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera.
- Dahlan, Azis, Abdul. 2014. *et. At., Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, cet. 4, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve.
- Al- Mubarak, syaikh Faisal bin ‘Abdul-‘Azis. 1984. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist Hadist Hukum*, diterjemahkan Oleh A. Qadir Hassan, et., al., cet. 1. Surabaya : Bina Ilmu.
- Djubaidah. Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*. Cet. 2 Jakarta : Sinar Grafika.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idus al-Kaff, cet. 1, Jakarta : Lentera Basritama.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan. 1974. *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Hukum dan Perundangn-Undangan.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Iislam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Al-Jurzairy, ‘Abd Rahman *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt.
- Al Shan’any, 1960. *Subul al-Salam*. Juz 3. Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Islamy, 1960.

- Rachmat Djatnika, 1991. *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid (et. Al.), *Kontropersi Pemikiran Islam di Inonesia*, Bandung: Rosda Karya.
- Departemen Agama RI, 1989. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putera.
- Ahmad Rafi Baihaqi, 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita media press).
- Asnawi, 2003. *Perkawinan Beda Agama*, cet. 1, (Bandung:Mizan).
- Sudarsono, 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta).
- Syarqani, 1995. *Mijanu al-Qubra*, Darul Fikri: Beirut.
- Wagianto, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang : Disertai Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro).
- M. Quraish Shihab, 1997. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan).
- Quraish Shihab, 2000. *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati).
- Yusuf Qardhawi, 1976. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, 1995. *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga*, (Jakarta: PT. Gunung Mulia).
- M. Nipon Abdullah Halim, 2001. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Amani).
- Jalaluddin, 2001. *Psikologi Agama*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia..* Kencana. Jakarta.
- Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wahhab al-Juhailiy, 1997. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr).
- Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Simbiosis Rekatama Media.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 2011. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokus media).